

Crossing the Strait: China's Military Prepares for War with Taiwan

Omar Farizi Wonggo

- Penulis** : Joel Wuthnow, Derek Grossman, Philip C. Saunders, Andrew Scobell, dan Andrew N.D. Yang (Editor)
- Penerbit** : National Defense University Press
- Tahun Terbit** : 2022
- Halaman** : 368 halaman

Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan pada 2-3 Agustus 2022 menjadi katalis dalam peningkatan tensi kawasan, utamanya di Selat Taiwan, dengan digelarnya latihan militer Tiongkok pada enam lokasi perairan mengitari Pulau Taiwan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Tiongkok akan melakukan invasi ke Taiwan dalam rangka unifikasi. Apabila terjadi eskalasi di Selat Taiwan maka fenomena ini akan menambah arena pertempuran yang terjadi pada 2022 setelah operasi militer Rusia terhadap Ukraina pada bulan Februari lalu yang berlangsung hingga sekarang.

Joel Wuthnow dan kawan-kawan dalam *Crossing the Strait: China's Military Prepares for War with Taiwan* membahas mengenai perhitungan pembentukan keputusan kebijakan Tiongkok serta kapabilitas dan operasi militer Tiongkok dalam rangka memproyeksikan invasi Tiongkok terhadap Taiwan. Wuthnow dan kawan-kawan menilai keputusan Tiongkok dalam menggunakan militer merupakan hasil dari deliberasi perhitungan untung-rugi, baik dari variabel domestik ataupun variabel eksternal, dibandingkan eskalasi tidak terencana. Setidaknya terdapat tiga variabel yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Tiongkok untuk menginvasi Taiwan.

Pertama, ketahanan politik dan ekonomi domestik menjadi kunci utama penggunaan militer. Partai Komunis Tiongkok melihat penggunaan militer sebagai upaya perkembangan positif terhadap pemulihan nasional-

unifikasi, dan menganggap dapat terlindungi dari sanksi ataupun konsekuensi lainnya yang menjadi risiko pengerahan invasi. Sementara itu, revolusi atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) baik dari sisi perangkat dan struktur komando dapat meningkatkan kepercayaan para pemimpin Tiongkok terhadap PLA untuk bertindak pada skala eskalasi yang dikehendaki di Selat Taiwan.

Kedua, tren politik Taiwan menjadi pengaruh dalam pembentukan kebijakan Tiongkok. Rendahnya dukungan unifikasi di Taiwan menurunkan tingkat kepercayaan Tiongkok terhadap prospek penyelesaian model satu negara-dual sistem. Dengan demikian, penggunaan intimidasi militer menjadi lebih menarik bagi Tiongkok, bahkan pengerahan pasukan apabila koersi gagal berfungsi, untuk mencegah kemerdekaan Taiwan dalam jangka waktu tertentu dan meyakinkan pemimpin Taiwan untuk menerima prasyarat Tiongkok dalam proses rekonsialisasi. Namun demikian, Tiongkok akan berhati-hati dalam menggunakan taktik provokatif yang berpotensi kontra produktif di mana terjadi konsolidasi di tataran pemimpin Taiwan dan menggalang dukungan yang cukup besar untuk kemerdekaan alih-alih menundukkan publik Taiwan.

Ketiga, Amerika Serikat merupakan variabel pengaruh yang cukup signifikan dalam pertimbangan pembuatan kebijakan Tiongkok. Peningkatan koordinasi militer dan pembelian alutsista antara Amerika Serikat dan Taiwan dalam pengembangan pertahanan Taiwan meningkatkan efek *deterrent* bagi Tiongkok untuk tidak memerangi Amerika Serikat. Sebaliknya, perspektif militer melihat bahwa opsi invasi lebih menguntungkan dibanding opsi militer lainnya dalam mengantisipasi intervensi Amerika Serikat, baik dalam memobilisasi pasukan ataupun memperluas koalisi.

Kapasitas dan operasi militer PLA menjadi dimensi lain yang mendukung atau tidaknya fisibilitas penggunaan militer pada isu Taiwan bagi Tiongkok.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan Tiongkok pada aspek militer adalah menggelar latihan amfibi untuk mengintimidasi publik Taiwan disaat yang bersamaan PLA juga mempublikasikan latihan militernya untuk menunjukkan kapasitas dan intensi Tiongkok terhadap Taiwan dan Amerika Serikat. Sementara itu, terdapat peningkatan dramatis terhadap aktivitas pesawat tempur Tiongkok melintasi garis tengah Selat Taiwan serta peningkatan tempo dan kompleksitas penerbangan Angkatan Udara dan Angkatan Laut PLA di dalam Zona Pertahanan Udara Taiwan. Operasi tersebut dilakukan dengan tujuan, diantaranya, menormalkan jumlah aktivitas militer yang lebih intens, menguji respons Amerika Serikat, memberikan efek *deterrent* terhadap Taiwan, dan meningkatkan semangat nasionalitas domestik Tiongkok.

Namun demikian, masih terdapat beberapa upaya militer yang belum ditempuh Tiongkok sebagai kebijakan dalam mengelola Selat Taiwan. Pertama, PLA dapat mengokupasi pulau terluar seperti Dongsha/Pratas untuk memperluas kontrol terhadap teritori Taiwan. Kedua, serangan siber terhadap Taiwan, termasuk infrastruktur sipil, merupakan potensi langkah yang akan diambil Tiongkok. Ketiga, peningkatan aksi koersif yang dapat dilakukan PLA, seperti, bombardir misil ataupun blokade udara, maritim dan informasi dalam mengisolasi Taiwan. Kampanye isolasi ini dipandang bertujuan memaksa Taiwan dalam meja perundingan ataupun menyiapkan kondisi untuk invasi. Pasukan Amfibi yang dimiliki Tiongkok tidak hanya berguna dalam operasi pendaratan di pulau tetapi juga dapat berguna dalam mengamankan perairan vital pada saat blokade. Terakhir, pengerahan militer untuk melakukan invasi skala penuh terhadap Taiwan menjadi ancaman terbesar yang sampai saat ini belum ditempuh Tiongkok, walaupun dipandang sudah dilakukan persiapan.

Dalam mempersiapkan skenario invasi skala penuh, terdapat dua aspek utama yang telah dilakukan PLA, penguatan doktrin-struktur komando dan peningkatan kapasitas tempur alutsista, yang menyesuaikan teater

pertempuran di Selat Taiwan. PLA telah menyiapkan doktrin perang amfibi dengan peningkatan kualitas kapabilitas personil dan sistem komando untuk mengatasi tantangan dalam menyebrangi dan membuat pijakan di Selat Taiwan pasca perang atrisi. Selain itu, PLA juga telah mengembangkan perang kota dan kapasitas lainnya yang dibutuhkan apabila Taiwan tidak segera menyerah. PLA telah mempersiapkan perubahan secara besar untuk menghadapi berbagai skenario kontigensi invasi Taiwan. PLA melakukan konversi divisi menjadi brigade yang dilakukan melalui reformasi pada tahun 2017. Unit kapal Angkatan Darat PLA yang melengkapi Angkatan Laut telah di brigadisasi dan dilengkapi dengan alutsista terbaru. Angkatan Udara PLA juga dilakukan brigadisasi yang meningkatkan kapasitas manuver dan struktur. Transisi PLA yang menjadi lebih datar dan rata mendorong inisiatif dan keleluasaan bagi brigade dalam bertindak.

Reformasi juga dilakukan untuk menghasilkan sistem dalam sistem yang lebih kohesif melalui struktur komando bersama yang memberikan kapasitas komando lebih besar bagi komandan di medan perang dalam memobilisasi aset nasional. Sentralisasi logistik PLA telah bergeser dengan menempatkan ulang titik amunisi dan perlengkapan lainnya disepanjang garis terdepan. Terlebih terdapat konfigurasi ulang pada sistem mobilitas di mana beberapa Provinsi akan memobilisasi dan memfasilitasi kebutuhan pasokan dari Utara hingga Pesisir Timur Tiongkok saat perang berlangsung.

Dari sisi penguatan kelengkapan alutsista, peningkatan jumlah kapal amfibi tipe 75 yang dapat menampung 30 helikopter dapat menguatkan kapasitas PLA dalam menyebrangi Selat Taiwan. Terlebih, pengadaan kendaraan tempur amfibi jenis ZLT-05 yang dilengkapi dengan meriam 105mm dapat meningkatkan kapasitas komandan dalam melakukan serang langsung dengan kondisi optimal. Selain itu, pengikutsertaan kapal sipil jenis *roll-on/roll-off* berkapasitas tinggi, kapal milisi maritim dan kapal

semi-submerge dilakukan guna memenuhi kebutuhan angkutan penyebrangan laut bagi operasi PLA.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh PLA dalam melakukan invasi dengan penguatan yang telah dilakukan. Pertama ketidakcukupan armada pengangkut personil, baik laut ataupun udara, untuk menyebrangi Selat Taiwan. Penggunaan armada angkut sipil menjadi salah satu solusi namun masih dipertanyakan kemampuannya pada kondisi riil perang dan terpaan arus di Selat Taiwan. Kedua, penguatan organisasi melalui reformasi PLA menciptakan kelemahan baru. Dorongan terhadap pengerahaan skema batalion gabungan sebagai unit dasar dapat mengakibatkan rantai komando dan personil ditingkat bawah lebih terbebani dengan menghadapi kerentanan yang diakibatkan jaringan sistem komando dan informasi, diantaranya, potensi manajemen mikro konflik oleh pusat dan dorongan di tingkat yang lebih rendah untuk meneruskan keputusan kembali ke atas rantai komando membuat kapasitas Komandan Teater Timur melaksanakan keputusan tepat waktu. Terlebih terdapat tensi pada struktur komando gabungan dalam mengakui bahwa komandan di tingkat operasional dan taktis perlu diperkuat dengan diberikan kewenangan dalam memutuskan keputusan yang sulit dan cepat yang cukup berlawanan terhadap upaya Xi dalam meningkatkan pengambilan keputusan terpusat kolektif dan memperkuat peran komite partai melalui PLA. Ketiga pada sisi latihan perang kota yang dilakukan PLA masih belum memperhitungkan kemunculan faksi pemberontak sebagaimana yang dihadapi Amerika Serikat di Afganistan ataupun Irak. Selain itu, kurangnya pelaksanaan latihan gabungan lintas matra dapat mempengaruhi efektivitas dalam medan perang yang diikuti rendahnya pakar yang memiliki kemampuan pengerahan pasukan lintas matra.

Di sisi lain, upaya Taiwan dalam memperkuat pertahanannya perlu menargetkan serangan utama pada jaringan sistem logistik Tiongkok yang terpusat guna memperlambat kapasitas mobilisasi dan mempertahankan

pasukan pada medan tempur. Selanjutnya Taiwan perlu memperkuat kapasitas perang asimetris. Keterbatasan jumlah angkatan yang dimiliki PLA berujung pada pemusatan titik tumpu dalam mendarat yang menguntungkan Taiwan dalam penempatan amunisi dan perlengkapan lain yang terbatas di satu titik. Persenjataan Taiwan yang berfokus pada penangkalan, seperti rudal antikapal, ranjau laut modern, kapal serang cepat, harpoon rudal pertahanan pantai, howitzer, dan rudal stinger, dapat meningkatkan pertimbangan PLA dalam perang atrisi dengan pasukan amfibinya yang menimbulkan efek *deterrent*. Namun demikian, Taiwan perlu memperhatikan isu personil, baik secara jumlah ataupun penguatan komponen cadangan, serta isu jumlah bahan baku logistik dalam memitigasi blokade. Institusi pertahanan Amerika Serikat dan Taiwan dapat bekerja bersama dalam memperbaiki postur Taiwan di mana didalamnya membutuhkan komitmen politik dan pendanaan yang tinggi dari Taiwan.

Posisi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Joe Biden tidak jauh berbeda dengan Donald Trump terhadap Tiongkok. Alih-alih relaksasi antara hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dibawah Biden, persaingan Amerika Serikat-Tiongkok kian menajam. Pada akhir tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Panduan Strategis Keamanan Nasional Sementara yang memuat tiga pilar terkait kebijakannya terhadap Tiongkok, yaitu pembaruan ekonomi dan politik domestik untuk menghadapi Tiongkok, urgensi pembuatan tujuan bersama dengan sekutu Amerika Serikat, dan tawaran visi masa depan yang bersaing berdasarkan rencana "Build Back Better" dalam mentransformasi Amerika Serikat melalui investasi pada program sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Secara spesifik mengenai kondisi Selat Taiwan, Biden menyampaikan terkait komitmennya dalam mendukung Taiwan melalui militer yang secara paralel diklarifikasi bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak berubah di mana tetap mengadopsi *One China Policy* dan memenuhi komitmennya dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Dengan demikian, strategi ambiguitas yang diadopsi Amerika Serikat dalam mengelola isu

Taiwan tetap berjalan. Poin menarik yang dapat diproyeksikan apakah personil militer Amerika Serikat akan terjun langsung apabila eskalasi melonjak dan invasi terjadi atau Amerika Serikat hanya akan memberikan dukungan materil, baik perlengkapan dan logistik militer, sembari mengerahkan sekutunya sebagaimana yang terjadi pada perang Rusia-Ukraina.

Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo* di Selat Taiwan. Apabila Tiongkok berhasil melakukan unifikasi dan menduduki Pulau Taiwan, maka secara militer strategis sangat merugikan Amerika Serikat, diantaranya, meningkatnya kerentanan Kepulauan Selatan Jepang dan menghambat mobilitas Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Secara ekonomi strategis Amerika Serikat perlu memperhitungkan dampak terjadinya perang terhadap pasar global dan dampak pasca Taiwan bergabung dengan Tiongkok daratan. Hal tersebut mengingat Taiwan merupakan pemasok utama produk manufaktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), alat kesehatan, dan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat. Pengamanan perlu dilakukan utamanya pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yang merupakan aktor monopoli sektor TIK, nano cip dan semi konduktor lainnya, di mana Amerika Serikat dan Eropa bergantung terhadap keterbukaan, keadilan, dan keberlangsungan dalam mengakses produk berteknologi tinggi tersebut.

Sementara itu, ASEAN merespons terhadap perkembangan di Selat Taiwan dengan mengeluarkan Pernyataan Bersama Menteri Luar Negeri ASEAN yang menyerukan kekhawatiran jika situasi tersebut dapat mengacaukan kawasan yang terus berekskalasi dari kesalahan perhitungan, konfrontasi serius, konflik terbuka, hingga konsekuensi tak terduga di antara kekuatan negara adidaya. Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga menyerukan pengekan maksimum dan meminta semua pihak untuk menahan diri

dari tindakan provokatif serta menekankan atas penegakan prinsip Piagam PBB dan Traktat Perdamaian dan Kerjasama di Asia Tenggara. Terlebih, dunia saat ini dinilai sangat membutuhkan kebijaksanaan dan tanggung jawab semua pemimpin untuk menjunjung tinggi multilateralisme dan kemitraan. Dibutuhkan kerja sama, hidup berdampingan secara damai, dan persaingan yang sehat untuk tujuan bersama dalam mencapai perdamaian, stabilitas, keamanan, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan. ASEAN harus bertindak bersama dan ASEAN siap memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog damai antara semua pihak termasuk melalui pemanfaatan mekanisme yang dipimpin ASEAN untuk mengurangi ketegangan, menjaga perdamaian, keamanan, dan pembangunan di Kawasan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan yang terjadi di Selat Taiwan akan berdampak secara geopolitik bagi negara-negara ASEAN. Pada sisi ekonomi berlakunya sanksi ekspor Taiwan ke Tiongkok membuka kesempatan negara-negara ASEAN meningkatkan eksportnya kepada Tiongkok. Namun demikian, hal itu menunjukkan bahwa ASEAN akan menjaga jarak dengan Taiwan dan memihak kepada Tiongkok. Pada sisi politik-keamanan, ASEAN akan menghadapi ujian nyata di mana pengerahan militer Tiongkok pada Laut Tiongkok Timur dapat meluas ke LTS dalam memperlihatkan posisi Tiongkok terhadap klaim maritimnya di LTS. Selain itu, sentralitas dan kepemimpinan ASEAN juga diuji dalam menengahi permainan *tit-for-tat* antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke 55 terkait pembahasan perkembangan Selat Taiwan.

Indonesia perlu mempersiapkan diri terhadap berbagai skenario perkembangan Selat Taiwan mengingat area tersebut merupakan area strategis bagi Indonesia, utamanya pada jalur logistik Indonesia dan pertahanan maritim Barat Indonesia. Negara Asia Timur merupakan mitra utama perdagangan Indonesia sehingga Selat Taiwan menjadi perlintasan

utama bagi mobilitas ekspor-impor Indonesia. Apabila perkembangan Selat Taiwan dan sekitarnya mengarah pada perang terbuka-invasi, maka diproyeksikan terdapat penurunan ekspor senilai 130,891,1juta US dollar dengan asumsi tidak dapat dimungkinkan pergerakan barang antar negara. Selain itu, impor mesin dan alat elektronik Indonesia yang memiliki proporsi 36% dari total impor nasional dapat terganggu mengingat komponen produk tersebut sangat bergantung pada cip-komponen semikonduktor lainnya yang diproduksi Taiwan.

Pada aspek politik-keamanan, perkembangan Selat Taiwan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pembahasan dalam berbagai Konferensi Tingkat Tinggi dan permainan tit-for-tat antara Amerika Serikat dan Tiongkok tak mungkin terelakkan. Apabila dalam dua bulan kedepan terdapat eskalasi yang signifikan isu tersebut akan menambah panas pertemuan G20, setelah isu perang Rusia-Ukraina, di mana tahun ini Presidensi G20 berada di Indonesia. Sementara itu, jika perkembangan eskalasi terjadi pada penghujung tahun ataupun pada tahun depan, maka Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 memiliki isu tambahan yang perlu dikelola di kawasan selain sengketa LTS, krisis kemanusiaan di Myanmar, serta perkembangan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan krisis pangan-energi global.